

ABSTRAK

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah digunakan skor kinerja pemerintah daerah. Skor kinerja pemerintah daerah didapat melalui kantor Kementerian Dalam Negeri Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan status kinerja pemerintah daerah yang tinggi di Indonesia pada tahun 2014. Namun, masih terdapat Kabupaten/kota di Jawa Barat yang mendapat kategori kinerja pemerintah daerahnya sedang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar karakteristik pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit dan skor kinerja pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014, serta mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) dengan waktu penelitian tahun 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 kabupaten/kota. Dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 26 kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Belanja Daerah, DAU dan Opini Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, DAU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti selanjutnya menambah variabel lain dengan menambah periode penelitian dan menggunakan objek penelitian lain. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. Sebaiknya lebih diperhatikan daerah yang memiliki Kinerja Pemerintah Daerah yang sedang agar Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat merata.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Opini Audit.